

**KARYA ILMIAH**

**LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRINSIP  
(STANDAR) AKUNTANSI DI INDONESIA**

Oleh :

**WARSANI PURNAMA SARI, SE. AK.**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**



**KARYA ILMIAH**

# **LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRINSIP (STANDAR) AKUNTANSI DI INDONESIA**

Oleh :

**WARSANI PURNAMA SARI, SE. AK.**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

## KATA PENGANTAR

-Alhamdulillah, atas berkat karunia dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Latar Belakang Lahirnya Prinsip (Standar) Akuntansi Di Indonesia”** dengan semestinya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan buah pikiran untuk Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area sehingga akan menambah perbendaharaan bacaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa atau pembaca lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, di mana hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk dikritik atau diberi saran agar tulisan singkat ini mendekati sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Rasdianto, MS. Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga tulisan ini bisa dikerjakan.

Medan, 14 Juni 2001

Penulis,



**Warsani Purnama Sari, SE. Ak.**

## LEMBARAN PENGESAHAN

1. Judul : **LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRINSIP (STANDAR) AKUNTANSI DI INDONESIA**
2. Penulis :
  - a. Nama : Warsani Purnama Sari, SE.Ak.
  - b. NIP : -
  - c. Pangkat/Golongan : -
  - d. Jabatan : -
  - e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
  - f. Universitas : Universitas Medan Area (UMA)
3. Bidang Tulisan : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi UMA,



**Drs. Rasdianto, MS. Ak.**

NIP : 130 936 278

Medan, 14 Juni 2001  
Penulis,



**Warsani Purnama Sari, SE. Ak.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan .....	1
Perkembangan Akuntansi Di Indonesia Sebelum Lahirnya Prinsip (Standar) Akuntansi Indonesia.....	2
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Prinsip (Standar) Akuntansi Indonesia .....	20
Kesimpulan .....	28
Daftar Pustaka .....	29

# LATAR BELAKANG LAHIRNYA PRINSIP (STANDAR) AKUNTANSI DI INDONESIA

## **Pendahuluan**

Profesi akuntan memegang peranan yang sangat dominan dalam masyarakat, karena di samping berperan sebagai pengukur efektivitas dan efisiensi produksi, para akuntan juga berperan sebagai pengukur efektivitas dan efisiensi yang menentukan distribusi pendapatan pada kelompok-kelompok pemilik sumber-sumber ekonomi. Dalam konteks ini para akuntan terlibat dalam tugas-tugas sosial politik sebagai mediator konflik-konflik kepentingan di antara berbagai kelompok kepentingan dalam organisasi melalui penyajian informasi kuantitatif keuangan yang tidak berpihak dan dapat dipercaya.

Perlu kita ketahui bahwa produk dari proses akuntansi keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebelum sampai pada SAK, aturan yang dipakai adalah Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Suatu kejadian tidaklah mungkin terjadi tanpa suatu sebab, begitu juga dengan prinsip (standar) akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penyusunan prinsip (standar) akuntansi Indonesia, mulai dari PAI 1973 sampai dengan SAK 1994 tidaklah terjadi begitu saja, tapi disebabkan oleh banyaknya faktor yang menyebabkan disusunnya prinsip (standar) akuntansi tersebut.

## **Perkembangan Akuntansi Di Indonesia Sebelum Lahirnya Prinsip (Standar)**

### **Akuntansi Indonesia**

Sebelum bangsa Eropa datang ke tanah air kita, hampir seluruh perdagangan dilakukan dengan barter. Perdagangan dengan Cina, Gujarat, Siam, dan Persia seluruhnya dilaksanakan dengan barter pada zaman Sriwijaya, Gajah Mada, dan lain-lain. Mereka membawa sutera, tembikar ke Indonesia, dan mengangkut beras dan rempah-rempah kembali ke negara asalnya. Dan seperti telah dikatakan Littleton sebelumnya, transaksi barter tidak membutuhkan catatan, karena transaksi tersebut akan berakhir pada saat kegiatan tukar menukar itu berlangsung.

Pada permulaan abad ke-17, sewaktu VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) mulai menanamkan modalnya di Indonesia, mulailah dikenal adanya pembukuan di Indonesia. Tetapi pembukuan ini hanya dipakai oleh VOC untuk kepentingannya sendiri, karena bangsa Indonesia hidupnya sangat sederhana, hanya terdiri dari petani dan pelaut, sehingga mereka tidak membutuhkan pembukuan. Mereka hanya menyerahkan hasil tanamannya kepada tengkulak yang tertentu atau kepala kampung. Tidak ada masalah hutang, piutang, stok, dan lain-lain.

VOC merupakan suatu organisasi dagang yang didirikan oleh Belanda yang mempunyai beberapa hak, yaitu:

1. Hak untuk membentuk angkatan perang sendiri.
2. Hak untuk membuat uang sendiri.
3. Hak untuk berdagang.

Dari bentuk hak-hak itu, jelas dibutuhkan organisasi yang kuat terencana dan baik pelaksanaannya untuk dapat mengemban tugasnya sehingga yang diharapkan dapat tercapai, sehingga sudah sepantasnyalah VOC membutuhkan suatu pembukuan yang baik. Pada tahun-tahun pertama berdirinya VOC belum terpikirkan untuk mengadakan pemberesan administrasi atau pembukuan, karena pada waktu itu yang penting adalah penguasaan daerah-daerah yang menjadi sasaran pengambilan kekayaan hasil rempah-rempahnya (Banten dan Ambon).

Menurut Stibbe<sup>1</sup>, akuntansi di Indonesia telah diterapkan sejak 1642, hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya sebuah instruksi dari Gubernur Jenderal, mengenai kepengurusan dari pembukuan penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, jumlah yang diperlukan untuk eksploitasi (budget) garnisun-garnisun dan galangan-galangan kapal yang ada di Batavia dan Surabaya. Dalam instruksi tersebut juga dijelaskan mengenai jurnal, buku besar dan diberikan juga penjelasan bagaimana caranya mengadakan pembetulan jika terjadi kesalahan pada pembukuan.

Pada tahun 1747, berdirilah *Amphioen Sociteyt* di Jakarta, di sinilah jejak akuntansi dapat jelas ditemui pada pembukuannya. *Sociteyt* ini merupakan sebuah badan usaha VOC yang bertugas mengedarkan candu Indonesia (*Amphioen* = morfin) dengan tujuan mencari laba. Yang menjadi langganannya kebanyakan bangsa Cina. Sistem pembukuan *Sociteyt* ini menerapkan sistem pembukuannya Italia "Lucas Pacioli". Hal ini dapat dibuktikan karena dalam *Amphioen Sociteyt* juga terdapat buku-buku seperti buku memori, jurnal, dan buku besar dengan uraian sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> D.G. Stibbe & Dr. St. J. Stroomberg, *Encyclopaedie Van Nederlandsch Indie*, hal. 821.

1. Buku memori,

Buku ini merupakan kekuatan dasar untuk melaksanakan pembukuan selanjutnya ke dalam buku jurnal dan buku besar, terlepas pada besar kecilnya transaksi. Dalam buku ini kelihatan jelas sekali penjelasan mengenai transaksi, penjelasan pemakaian uang kertas dan uang perak, antara satu transaksi dengan transaksi yang lain jelas ditarik garis untuk memisahkan keduanya, lalu tanda tangan yang membuat ada pada tiap akhir periode

2. Buku jurnal,

Ke dalam buku ini dicatat hal-hal yang merubah kekayaan perusahaan atau badan, juga mulai disebutkan standar uang. Ia menguraikan secara vertikal maupun horizontal setiap transaksi, kepada ayat apa transaksi tersebut berpengaruh dengan mempergunakan ekspresi debit dan credit sebagai sarannya. Dalam buku ini belum dipakai istilah debit dan credit, di sini masih dipergunakan ekspresi lama yaitu per untuk debit dan A untuk credit yang berarti kepada. Sebelah ujung, sebelum kolom uang, terdapat kolom untuk penunjukkan rekening buku besar yang akan diisi dengan nomor-nomor. Misalnya, kas akan mempunyai nomor 1, nomor 1 ini akan jelas terlihat pada kolom tersebut.

3. Buku besar,

Buku ini merupakan terminal terakhir dari perjalanan transaksi setelah dipisah-pisahkan dengan mempergunakan debit dan credit sebagai sarannya. Dalam terminal ini disiapkan kantong-kantong yang akan menampung jenis jenis transaksi yang serupa dan nomor-nomor dalam salah satu kolomnya merupakan

alat bantuan yang besar pula, sehingga perubahan komposisi harta, utang, dan modal akan segera kelihatan. Dengan mempergunakan data dari kantong-kantong, ditambah penyesuaian-penyesuaian dapat segera dipersiapkan laporan keuangan.

Pada catatan Amphioen Sociteyt, buku besar sama bentuknya dengan yang lazim kita kenal dengan “T-form” sekarang. Bernomor lajur dan kolom tertentu untuk nomor guna penunjukkan dari nomor berapa ayat itu berasal. Anehnya, kalau tadi pada jurnal tidak terlihat ekspersi debit dan credi, maka dalam buku ini ditemukan sisi debit dan credit, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemakaian istilah debit dan credit itu dimulai dari buku besar dahulu baru merembet pada jurnal. Pembukuan dimulai dengan bukti-bukti otentik berupa faktur, lengkap beserta tanda tangan yang menerima beserta segel yang pada zaman itu merupakan lak merah. Bukti penerimaan dan pengeluaran dikumpulkan dalam satu buku. Untuk membayar dan menyimpan uang dipercayakan kepada kasir. Setiap bukti uang keluar akan memakai pembukuan kata-kata seperti ini :

“Saya bernama Arief, jabatan cashir pada Amphioen Sociteyt, pada hari ini tanggal 1 September 1747 telah menerima uang sebesar real ..... (tidak dengan angka tapi dengan huruf) untuk pembelian morfin 10 peti isi sekian kati.”

Berdasarkan bukti pembukuan di atas, jelaslah bahwa kasir tidak mungkin mengelak jika nanti terjadi sesuatu. Di samping itu jika ia pada hari itu menerima 10 transaksi, maka ia harus menulis kuitansi 10 kali dengan kata-kata yang sama dan bentuk serta tanda tangan pula. Setelah bukti penerimaan atau pengeluaran uang selesai, maka

pemegang buku akan menuliskan setiap transaksi tersebut secara setahap demi setahap (stuk per stuk) ke dalam buku memorial. Laporan keuangan yang ada hanya berupa saldo, dan tidak ditemukan perhitungan rugi dan laba. Saldo yang adapun tidak menggolongkan piutang, hutang, cadangan, semua diterakan satu per satu, sehingga secara sekilas seperti laporan buku kas masuk dan keluar saja.

Metode pembukuan yang dipakai Amphioen Sociteyt adalah metode lama (semua jiplakan Pacioli-Italia). Pemakaian metode lama ini sangat tidak efisien dan terlalu banyak memakan waktu karena mempergunakan cara pembukuan setahap demi setahap. Misalnya, jika ada 10 kali penjualan kepada berbagai orang yang berlainan, maka pemegang buku akan memasukkan 10 kali cerita itu ke dalam buku memorial, 10 kali ke dalam buku jurnal, dan 10 kali memasukkan ke dalam buku besar. Hal ini dirasakan terlalu banyak memakan tenaga, memakan waktu, juga kertas, tinta, dan lain-lain.

Metode pembukuan lama terus dipakai Belanda sampai dengan tahun 1850. Dalam periode 1850-1900 terjadi semacam dualisme pembukuan, di mana sebagian masih mempergunakan metode lama dan sebagian sudah mulai menerapkan metode baru yang lebih efisien, yaitu :

1. Pembagian buku memorial menjadi buku harian yang terdiri dari :
  - a. Buku kas.
  - b. Buku pembelian.
  - c. Buku penjualan
  - d. Buku memorial.

Sehingga setiap transaksi terjadi, segera dapat digolongkan ke dalam buku mana ia akan dimasukkan.

2. Jurnal secara kolektif dilaksanakan secara bulanan, mingguan, atau harian, tergantung kepada kepentingan perusahaan. Di sini jurnal tidak dilaksanakan secara setahap demi setahap lagi.

Pada awal abad ke-20 metode pembukuan lama benar-benar hilang dari sejarah akuntansi Belanda, sebagaimana dikatakan Dr. W. Kreukniet dalam bukunya "Supplement op Practisch Boekhouden" – Eerste Stuk, sebagai berikut :

**"Bij het oorspronkelijke (z.g. Italiaanse) dubbel boekhouden werden alle dagboeken stuk voor stuk in het memoriaal opgenomen, en van uit dat boeknaar het grootboek overgebracht. Deze handel wijze was nodeloos omslacting, en in de loopder 19e eeuw, toen het aantalposten, dal dagelijks moest worden opgenomen, in alle sterktetoenam, is geleidelijk de oude (z.g. enkelvoudige of dagelijkse) methode, d.i. het dubbel boekhouden met ongesplisht memoriaal en met enkelvoudige journaalposten, verdrongen door de meer rationale methode (z.g. collective of maandelijkse) met gesplisht dagboek en met gecombineerde journaalposten. Natuurlijk heeft de overgangperiode tientallen jaren geduurd. Pas in de 20e eeuw is de z.g. dagelijkse methode geheel an het toneel verdwenen"**<sup>2</sup>

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa pada abad ke-19 dipakai metode pembukuan rangkap yang asli dinamakan sistim Italia, di mana jumlah posts atau ayat-ayatnya tiap hari harus dicatat ke dalam buku harian, buku memorial dan buku besar. Di sini juga kelihatan bahwa buku harian, buku besar, dan jurnal masih terpisah. Metode lama ini menurut Dr. W. Kreukniet sebetulnya tidak baik, dan abad ke-20 metode lama ini hilang sama sekali.

---

<sup>2</sup> Ansje Saribanon Sapië, Skripsi, *Sejarah Perkembangan Akuntansi Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 80.

Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul pada tahun 1870 yaitu keluarnya Undang-Undang (UU) Gula yang menghapuskan tanam paksa tebu. Pada tahun 1877 praktek tanam paksa hapus sama sekali, kecuali kopi, karena kopi tetap memberikan keuntungan yang besar. Baru pada tahun 1915 tanam paksa kopi benar-benar dihapuskan, tapi dihapuskannya itu bukan karena gugatan Baron van Hoevell dan Fransen van de Putte (Multatuli), melainkan karena desakan kaum liberal, kaum borjuis, kaum kapitalis, dan kaum pengusaha swasta yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Di sinilah timbul kapitalis-kapitalis Belanda, yang datang untuk mencari keuntungan di Indonesia. Dunia bisnis mulai berkembang meski semuanya pada awalnya ada di tangan belanda.

Kapitalis-kapitalis Belanda menanamkan modalnya dalam bidang perkebunan, perindustrian, dan perniagaan. Modal asing dapat berkembang di Indonesia, karena mereka mempergunakan tenaga yang murah yaitu rakyat Indonesia. Dan Hasil industrinyapun mereka jual kepada rakyat Indonesia yang melimpah banyaknya. Sekolah-sekolah didirikan bukan untuk membuat pandai bangsa Indonesia, tetapi karena Belanda membutuhkan pegawai-pegawai untuk kantor-kantor, pabrik-pabrik, dan kebun-kebun dengan upah yang murah. Rumah sakit didirikan bukan untuk membuat rakyat sehat, tetapi karena Belanda membutuhkan kaum buruh yang kuat dan sehat. Pengairan dibangun bukan untuk mengairi sawah rakyat, tapi untuk mengairi kebun tebu. UU agraria yang diadakan tahun 1870 melarang petani menjual tanahnya kepada orang asing, bukan diadakan untuk melindungi rakyat dan petani,

tapi agar Belanda dapat menyewanya dengan harga yang murah sebab bila tanah menjadi milik asing, pengusaha Belanda tidak bisa menyewanya dengan murah.

Pendidikan dalam bidang akuntansi dikenal bangsa Indonesia pertama-tama melalui sekolah menengah umum seperti MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), AMS (Algemene Middelbare School), dan HBS (Hogere Burger School). Ada juga sekolah khusus seperti Handel School dan Middelbare Handels School. Di samping itu terdapat pula pendidikan "Boekhouden" yang diadakan di luar sekolah, untuk memungkinkan pemberian pendidikan kepada mereka yang pada pagi hari dan siang hari bekerja di kantor, dan ada pula kursus-kursus yang memberikan pelajaran pada sore hari, seperti Mercuries dan Schroevers, dan lain-lain. Pada tanggal 30 Maret 1925, di Semarang berdirilah "Bon van Verenigingen Voor Handels Onderwijs" yang merupakan organisasi dari kursus-kursus yang ada di Indonesia, sehingga mulai tanggal tersebut terbentuklah wadah untuk bersama-sama mengatasi pendidikan luar sekolah.

Fungsi pemeriksaan (auditing) mulai dikenalkan di Indonesia sejak tahun 1907, yaitu dengan dibukanya Jawatan Akuntan Negara (Government Accountant Dienst=GAD). Jawatan ini dibuka oleh Van Schagen, seorang anggota NIVA<sup>3</sup> yang diutus ke Indonesia. Ia merupakan akuntan pemerintah yang pertama, tugas pokoknya ialah menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Pada tahun 1915 dengan resmi Jawatan Akuntan Negara terbentuk.

---

<sup>3</sup> NIVA (Nederlands Institut Van Accountants) merupakan Lembaga Akuntan Belanda. NIVA berisi peraturan atau pedoman untuk melakukan praktek auditing.

Sampai dengan tahun 1917 belum ada akuntan publik yang berpraktek di Indonesia, baru pada tahun 1918 Frese dan Hogeweg membuka kantornya di Jakarta, dan pada tahun 1920 kantor akuntan H.Y. Voerens juga dibuka di Surabaya. Frese Hogeweg sangat produktif, sampai tahun 1958 dalam sejarahnya pernah membuka cabang-cabang di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palembang. Kantor-kantor akuntan ini kebanyakan melayani perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Dalam hal ini audit itu penting untuk pemegang saham yang ada di negeri Belanda di samping pajak dan credit.

Pada tahun 1921 didirikan Jawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountant Dienst = BAD), fungsinya yaitu untuk mengontrol perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam masalah pajak. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi tercatat J.M. Massie yang diangkat sebagai pemegang buku untuk Jawatan Akuntan Pajak pada 21 September 1929.

Pada Bulan Maret 1942 Jepang menduduki Indonesia yang merupakan tanah jajahan Belanda. Bangsa Belanda yang masih ada di Indonesia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp yang telah didirikan Jepang. Akibatnya terjadi kekosongan pada personalia Jawatan Keuangan, dan hampir 90% jabatan pimpinannya dipegang oleh Bangsa Belanda. Dalam masa itu atas prakarsa MR. Slamet (waktu itu penasehat keuangan) didirikanlah kursus-kursus untuk mengisi kekosongan jabatan tadi dengan tenaga-tenaga Indonesia. Kursus tersebut dibagi dalam beberapa golongan sebagai berikut :

1. Kursus A : untuk menjabat Ajun Inspektur pada Departemen Keuangan syarat penerimaan ialah Sarjana Hukum, lama pendidikan 6 bulan.
2. Kursus B : Dibagi menjadi B1 untuk menjadi Controller Pajak, dan B2 untuk menjadi Pegawai Pajak (Belasting Ambtenaar). Pembagian ke dalam 2 jenis pendidikan itu akhirnya ditinggalkan, dan digabung menjadi satu, sehingga namanya hanya B saja. Lama pendidikan 1 tahun.
3. Kursus C : Untuk menjabat Ajun Akuntan, yang diterima yaitu lulusan SMA. Lama pendidikan 3 tahun. Ruang lingkup pelajaran hampir sama dengan guru MO (Middlebare Onderwijs = setingkat sarjana muda).
4. Kursus D : Untuk jabatan Pemegang Buku (Bookkeeper). Syarat penerimaan ialah lulusan MHS (Middlebare Handel School). Lama pendidikan 1 tahun.

Bersama dengan itu, universitas-universitas yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung ditutup semua, karena guru besarnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp, sehingga para mahasiswanya menganggur tanpa sekolah dan pekerjaan. Tentu saja pengumuman Departemen Keuangan yang diprakarsai Mr. Slamet segera mendapat tanggapan. Setelah melalui penyaringan, pada tanggal 1 Oktober 1942 kursus dibuka. Mereka yang diterima kursus langsung diangkat menjadi pegawai negeri Departemen Keuangan.

Pengikut-pengikut kursus yang nantinya menjadi penagak dan cikal bakal Departemen Keuangan pada zaman kemerdekaan adalah sebagai berikut :

Kursus A : Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Tatang, Mr. Lukman Hakim, Mr. Suyitno Mangunkusumo, Mr. Suprpto, Mr. Nasuko, dan lain-lain.

Kursus B : Prof. Mr. Sindian Jayadiningrat, Prof Dr. Rachmat Sumitro Sh, Santoso Brotodiharjo SH, Sudono SH, Ari Murthi SE, Syarwaini (alm), Parlindungan Talib, Astrawinata, dan lain-lain.

Kursus C : Prof. Dr. S. Hadibroto, Prof. Drs. Sumarjo, Drs. Suwargadi, Drs. Tugiyono, dan lain-lain.

Kursus D : Almatsier, Usnantha.

Para pengajar kursus mula-mula adalah dosen-dosen bangsa Belanda, seperti, De l'Ecluse, Visser, Lakeman, H. Polak, dan lain-lain, tapi sebagai akibat intrik dan keadaan perang Pasifik yang semakin seru, ahli-ahli Belanda itupun tidak diperkenankan keluar sama sekali untuk mengajar, dan pendidikan untuk selanjutnya diteruskan oleh tenaga putera asli Indonesia, yaitu : J.D. Massie, Mr. Slamet, Mr. Suyitno, R.S. Kusumoputo (Acte MO), Mr. Suprpto, dan Dr. Abutari.

Karena keadaan yang semakin sulit, dan Jepang ingin menguasai bidang keuangan, tetapi terbentur oleh kurangnya pegawai, maka pada tahun 1943 Jepang memutuskan untuk menghentikan saja kursus tersebut dan langsung mempekerjakan pengikutnya di Departemen Keuangan, meskipun pelajaran belum selesai seluruhnya. Hal ini dilakukan Jepang karena mereka membutuhkan tenaga bangsa Indonesia yang akan dipergunakan sebagai penasehat-penasehat bidang keuangan.

Sistem pembukuan pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang berarti, disebabkan karena singkatnya mereka berada di tanah air (3 tahun). Orang Jepang

sendiri menggunakan sistim pembukuan Jepang dngan Huruf Kanji yang tidak diajarkan kepada pegawai Indonesia. Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih tetap mempergunakan sistim pembukuan yang ditinggalkan Belanda, yaitu sistim tata buku tunggal dan berpasangan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, kekurangan tenaga akuntan sangat terasa. Pada thun 1947 hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari. Dalam masa perang kemerdekaan (1945-1950) kursus-kursus untuk mendidik tenaga di bidang akuntansi dilanjutkan. Mereka yang berkesempatan turut dalam pendidikan ini adalah, Prof Sumarjo, Prof. Dr. S. Hadibroto, Drs. Sudarmin (alm) dan Drs. Mr. Subroto (alm). Tapi sayang belum sempat kursus selesai, akhir tahun 1948 Yogyakarta diserbu Belanda dengan “agresi militernya”, sehingga lagi-lagi kursus ini terpaksa harus dihentikan di tengah jalan.

Pada tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan Belanda, Pemerintah republik Indonesia atas prakarsa Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara, baru mempunyai kesempatan untuk mengirim putera-puteranya ke laur negeri (Belanda dan Inggris) untuk belajar akuntansi. Pada masa ini terdapat bermacam-macam sistim pembukuan dengan mempergunakan huruf dan bahasa masing-masing. Hal ini tentu saja sangat mempersulit dalam pemeriksaan pajak. Akibatnya, pada tahun 1952, dengan melalui undang-undang keluarlah pelarangan penggunaan huruf-huruf Cina, Arab, dan India untuk pembukuan resmi, dan bahasapun harus bahasa Indonesia. Dalam bidang akuntan publikpun dirasakan kekurangan akan jasa-jasa mereka. Pada awal dekade tersebut hanya ada beberapa kantor akuntan seperti, Tan Eng Oen, Frese

& Hogeweg, Walta, Namink, Van Dien en van Uden, Oudshoff en Besancon, dan Preijer en de Haan. Jasa akuntan publik ini sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dalam hal membantu mempersiapkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk kepentingan pajak, pemegang saham di negeri Belanda, dan untuk kreditor. Perusahaan pribumi dan non pribumi (selain Belanda) jarang mempergunakan jasa-jasa akuntan publik, karena kebanyakan perusahaannya tergolong perusahaan perorangan yang tergolong kepada perusahaan kecil atau menengah saja.

Sebelum tahun 1954 kebanyakan orang tidak mengetahui apakah sebenarnya pekerjaan akuntan itu dan bagaimana pendidikannya. Beraneka ragam orang dapat menamakan dirinya akuntan tanpa mendapat teguran dan hukuman, padahal pengetahuan mereka mengenai akuntansi kurang sekali. Pekerjaan seperti, komisioner, makelar, jual beli rumah, tanah, dan sebagainya dianggap sebagai pekerjaan akuntan. Di samping itu ada juga kekacauan istilah yang bunyinya hampir sama dengan "accountant", tapi lain artinya yaitu istilah "a content" yang berarti tunai, sehingga banyak orang menyangka fungsi akuntan sebagai penjual tunai atau kasir yang harus mengurus uang tunai. Kadang-kadang ada juga orang menyangka akuntan ialah pemilik perusahaan angkutan. Pada masa itu juga bermunculan kantor akuntan yang dibuka dan dipimpin oleh orang-orang yang bukan akuntan. Seorang dengan ijazah Bond B dapat membuka kantor akuntan. Untuk itulah maka pada tahun 1954 pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU No. : 34 Tahun 1954, tentang

pemakaian gelar akuntan. Dengan UU tersebut, maka mereka yang berhak menyandang gelar akuntan ialah :

1. Mereka yang berijazah universitas negeri atau badan lain yang dibentuk menurut undang-undang dan diakui oleh pemerintah.
2. Ijazah dikeluarkan oleh Panitia Ahli, dengan melalui ujian yang diselenggarakannya.

Jadi Jelaslah sekarang, bahwa mereka yang tidak memiliki ijazah universitas di Indonesia tidak mungkin disebut seorang akuntan, di samping itu akuntan berijazah ini harus mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kantor akuntan yang tidak memenuhi syarat harus ditutup sejak tahun 1955.

Pendidikan akuntan mulai dirintis dengan dibukanya jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1952. Sistem akuntansi yang digunakan pada universitas ini adalah sistem bebas yang condong kepada sistem Belanda (karena guru-gurunya terdiri dari guru besar Belanda). Sebelum Universitas Indonesia membuka jurusan Akuntansi, maka kepada mereka yang ingin mendapatkan gelar akuntan harus ke negeri Belanda.

Sampai dengan awal tahun 1957, baik mengenai sistem akuntansi maupun pol. pendidikannya semuanya merupakan warisan Belanda. Akuntansi pada zaman itu dipergunakan untuk :

1. Membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak sesuai dengan peraturan.

2. Untuk mengadakan pencatatan dengan tujuan
  - a. pengendalian intern,
  - b. - perhitungan harga pokok,
  - c. mengetahui jumlah hutang dan piutang perusahaan, dan
  - d. mengetahui apakah perusahaan dapat membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangk panjangnya

Penekanan pada zaman itu adalah pada pencatatan dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu. Penggunaan pemakaian hasil pencatatan untuk analisa dan informasi belum umum pada waktu itu. Tekanan hanya untuk kontrol administrasi, seperti, apakah semua faktur telah dibukukan, apakah pengeluaran kas dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sebenarnya, apakah pembebanan untuk rekening-rekening seperti nomor dengan 0 s/d 9 relah benar, dan apakah penjumlahan horizontal maupun vertikal sudah benar. Pembukuan pada zaman itu mempergunakan buku memorial yang telah dipecah menjadi : Buku kas masuk, buku kas keluar, buku penjualan, dan buku prae memorial (lain-lain). Jurnal dilaksanakan secara harian, minggun atau bulanan tergantung kepada banyaknya atau sedikitnya transaksi.

Pada pertengahan tahun 1957, untuk pertama kalinya 4 orang putera Indonesia telah berhasil lulus menjadi akuntan Indonesia dari hasil produk pola pendidikan sistim Belanda dari fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mereka adalah ; B. Sidarta, H. Darmawan, Tan Tong Yoe, dan Go Tie Siem. Keempat putera Indonesia tersebut bersama Prof. Sumarjo mengambil prakarsa untuk mendirikan perkumpulan akuntan antar bangsa Indonesia. Mereka juga mengajak akuntan-

akuntan yang lain, seperti ; Prof. Abutari, Tio Po Tjiang, Tan Eng Oen, Tang Siu Tjhan, Liem Kwie Liang, dan The Tik Him. Untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia itu, para akuntan-akuntan tersebut mengadakan tiga kali pertemuan, yaitu :

1. Pertemuan ke-I, diadakan pada hari Kamis, 17 Oktober 1957, jam 19.00 di Aula Universitas Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh keempat akuntan yang baru lulus ditambah Prof. Sumarjo. Pada pertemuan ini dibicarakan tentang keinginan hadirin (5 orang) untuk mendirikan suatu perkumpulan akuntan Indonesia dengan tujuan antara lain :

- a. membantu pelaksanaan pengisian UU No. : 34/1954 diantaranya menyusun Reglemen Kerja, Peraturan Etika, dan sebagainya,
- b. membantu mengawasi ketaatan terhadap undang-undang tersebut di atas,
- c. membantu menjaga dan mempertinggi mutu pendidikan akuntan,
- d. mengadakan pertemuan-pertemuan untuk bertukar pikiran di antara para anggotanya, baik dalam lapangan teori maupun praktek.
- e. dan sebagainya

Pada pertemuan ini diputuskan

- a. untuk membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia,
- b. untuk menghubungi akuntan lainnya (yang tidak hadir) untuk menanyakan pendapat mereka tentang pendirian perkumpulan ini

Susunan panitia persiapan adalah :

Ketua : Prof. Sumarjo  
Penulis : Go Tie Siem  
Bendahara : B. Sidarta  
Komisaris : H. Dermawan dan Tan Tong Yoe

Pada tanggal 20 Oktober 1957 dikirimkan surat edaran kepada 6 akuntan lainnya untuk dimintakan pendapat mereka tentang gagasan pendirian perkumpulan tersebut. Ternyata 5 diantara 6 orang tersebut sangat setuju, sedangkan seorang lainnya pada prinsipnya juga setuju, hanya ia menentukan syarat jika akuntan-akuntan lain setuju, maka iapun setuju. Syarat tersebut ternyata dipenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua akuntan Indonesia (11 orang) setuju dengan didirikannya Perkumpulan Akuntan Indonesia.

2. Pertemuan ke-II, pada tanggal 5 Desember 1957, jam 19.00 di Aula Universitas Indonesia, yang dibicarakan ialah :
  - a. kemungkinan akuntan asing menjadi anggota,
  - b. akuntan asing yang pernah bekerja di Indonesia bisa menjadi anggota luar biasa,
  - c. tujuan perhimpunan,
  - d. iuran,
  - e. jumlah pengurus minimum, lamanya keanggotaan pengurus,
  - f. pendidikan asisten,
  - g. badan hukum perhimpunan,
  - h. jumlah rapat umum dan pertemuan dalam setahun, dan

- i. pemberantasan akuntan gadungan (beunhazerij) berhubung dikeluarkannya UU No. : 34/1954.
3. Pertemuan ke-III, tanggal 23 Desember 1957, jam 19.30, dengan acara : pendirian perkumpulan akuntan Indonesia, pemilihan pengurus, pertukaran pikiran anggaran dasar, dan lain-lain. Pertemuan ke-III ini merupakan tanggal bersejarah, karena pada hari itu dianggap berdirinya perkumupulan akuntan Indonesia yang dinamakan dengan **Ikatan Akuntan Indonesia** dengan singkatan **IAI**. Pengurus pertama ialah : Ketua : Prof. Sumarjo, Panitera : Go Tie Siem, Bendahara : B. Sidarta, Komisaris : Tan Tong Yoe dan H. Dermawan.

Setelah IAI terbentuk, rapat-rapat selanjutnya masih diadakan setiap 2 minggu sekali untuk membicarakan anggaran dasar. Konsep anggaran dasar selesai pada tanggal 15 Mei 1958, dan pada tanggal 19 Oktober 1958 anggaran dasar itu diajukan kepada Departemen Kehakiman untuk disahkan. Dan pada tanggal 11 Februari 1959 disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 No. : 24. Dengan demikian IAI telah berdiri dengan 11 anggota pada awalnya.

Dalam tahun 1957 pemerintahab Republik Indonesia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai akibat konfrontasi mengenai Irian Barat. Akibat putusnya hubungan ini maka para guru besar Belanda pulang dan lambat laun diganti oleh guru besar Amerika Serikat, sementara itu banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari ilmu akuntansi. Akibatnya ialah Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia dalam tahun 1960 secara resmi merubah kurikulumnya ke pola Amerika, walaupun tidak 100%.

Selama periode 1957-1967 perkembangan akuntansi tidak mengenal metode atau teknik-teknik pembukuan lain kecuali yang diawali dengan buku harian, ke buku jurnal dan selanjutnya ke buku besar. Memang didapat tambahan yang merupakan buku tambahan hutang dan piutang, tapi hanya mempermudah dalam pengumpulan informasi saja, sama sekali tidak merubah dasar pikiran (basic idea) daripada catatan yang berasal dari zamannya Lucas Pacioli. Mengenai bentuk laporan pada waktu ini, karena belum adanya prinsip-prinsip akuntansi, sehingga setiap akuntan mempunyai cara, interpretasi dan pendiriannya sendiri-sendiri yang berpedoman pada “prinsip kebiasaan pedagang yang baik”<sup>4</sup>. Pedoman ini diambil dari pedoman profesi akuntan di Belanda. Pedoman ini jelas tidak tertulis secara terperinci, sehingga dalam praktek akuntansi dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari para akuntan, karena pedoman tersebut hanya menyerahkan kepada para akuntan untuk memilih sendiri prinsip akuntansi yang sesuai. Malah terkadang banyak akuntan menyusun laporan keuangan sesuai dengan permintaan langganan. Jelaslah, sebelum lahir Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), maka di Indonesia terdapat dualisme sistim akuntansi, yaitu yang berpola Belanda dan yang berpola Amerika.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Prinsip (Standar) Akuntansi Indonesia**

Penentuan nasib sendiri bangsa Indonesia dimulai dengan diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pengaruh penjajahan

---

<sup>4</sup> M. Lian Dalimunthe, ‘Perkembangan Prinsip (Standar) Akuntansi Di Indonesia’, **Jurnal Ekonomi**, Nomor 7, Penerbit FE-USU, Agustus 1998.

bangsa Belanda setelah berlangsung selama 350 tahun serta ditambah dengan masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun sudah tentu sangat mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan situasi negara sangat tergantung pada negara penjajah. Arah pelaksanaan pembangunan hanya untuk kaum penjajah. Arah perkembangan negara bukan didasarkan kepada ingin tercapainya kesejahteraan warga Indonesia, tetapi sering terjadi mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu tekad para pemimpin bangsa Indonesia yang telah mempelopori untuk memproklamkan kemerdekaan tidak segan-segan mengorbankan jiwa, raga, dan materi demi tegaknya negara Indonesia yang bebas dan berdaulat.

Cermin dari kesungguhan bangsa Indonesia untuk merdeka dan bebas dari pengaruh penjajah, terlihat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan .....”. Pernyataan ini menunjukkan para pemimpin bangsa menyadari sepenuhnya bahwa penjajahan seharusnya tidak boleh terjadi.

Setelah terbebasnya dari pengaruh belenggu kaum penjajah, tentunya penataan sistim pemerintahan mulai dilakukan sendiri. Ini berarti bahwa arah pembangunan negara ditujukan untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang diwujudkan dalam beberapa aspek program pembangunan seperti, bidang pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan, Dalam pelaksanaan setiap program pembangunan sudah tentu membutuhkan pelaksana yang menguasai bidangnya. Menyadari akan hal ini, maka kondisi negara yang baru merdeka tentunya sebagian

besar masih dipengaruhi oleh sistem yang pernah dilakukan kaum penjajah. Dengan melihat akan lamanya penjajahan yang dilakukan, maka pengaruh Belanda terasa paling dominan.

Perkembangan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa juga tidak terlepas dari pengaruh Belanda. Oleh karenanya pada masa-masa awal setelah kemerdekaan dan untuk beberapa lama pengaruh ini masih terasa. Para pelaksana pendidikan, baik di tingkat dasar, tingkat pertama maupun atas, umumnya adalah mereka yang memperoleh pendidikannya pada penjajahan Belanda.

Upaya untuk memajukan pendidikan bagi warga negara yang pada masa penjajahan hanya untuk golongan-golongan tertentu saja, maka pada masa setelah bebas dari penjajahan ditujukan untuk meningkatkan keseluruhan segenap lapisan masyarakat. Untuk itulah maka pembangunan sarana fisik maupun pembukaan pada setiap jenjang pendidikan yang ada semakin mengalami peningkatan. Pembukaan-pembukaan setiap program pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maupun perguruan tinggi semakin menyebar ke seluruh pelosok negeri.

Universitas yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi sebagai sarana untuk menghasilkan para intelektual yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa dan negara sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Sejalan dengan permasalahan negara yang dihadapi seperti bidang teknologi, kedokteran, hukum, sosial dan politik, ekonomi dan budaya kiranya mendorong para pelaksana universitas untuk membentuk atau mendirikan fakultas-fakultas yang sesuai dengan kondisi di atas.

Fakultas ekonomi yang merupakan salah satu jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan para sarjana ekonomi, di dalam pelaksanaannya masih terbagi lagi dalam beberapa jurusan, seperti : studi pembangunan, ekonomi manajemen, dan akuntansi. Dari masing-masing jurusan tadi akan menghasilkan para sarjana yang mempunyai bidang tugas yang berbeda-beda.

Salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi adalah Universitas Indonesia yang dibuka pada tahun 1955. Universitas inilah yang pertama sekali membuka jurusan akuntansi yang kemudian diikuti oleh beberapa universitas negeri lainnya seperti : Universitas Padjajaran tahun 1961, Universitas Airlangga tahun 1962, dan Universitas Sumatera Utara tahun 1963.

Dari universitas-universitas tersebut, maka sejak tahun 1957 Indonesia telah menghasilkan produk akuntan dalam negeri. Lulusan akuntan negeri tahun demi tahun semakin bertambah. Menyadari akan pentingnya agar para akuntan mempunyai satu kesatuan dalam menjalankan profesinya serta dapat saling tukar menukar informasi untuk menyatakan aspirasinya, maka pada tanggal 23 Desember 1957 dibentuklah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan melihat akan bidang tugas yang dijalankan, maka para akuntan sesuai dengan profesinya dapat dikategorikan berkecimpung sebagai akuntan intern, akuntan publik maupun akuntan pendidik. Pada dasarnya fungsi akuntan adalah memberikan informasi kepada manajemen melalui laporan keuangan yang disajikan untuk dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Sampai dengan tahun 1957 saat terbentuknya IAI, profesi akuntan Indonesia belum mempunyai suatu pedoman resmi yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Keadaan ini tentunya menyulitkan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan oleh para akuntan. Oleh karenanya akan terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai corak dan ragam laporan keuangan sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing akuntan.

Dalam sejarah perkembangan akuntansi Indonesia, sebagaimana yang sudah penulis kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa pada periode 1960-an bangsa Indonesia mengenal dua pola pendidikan yang mula-mula berpedoman pada sistem pendidikan Belanda dan yang belakangan mengarah pada pola Amerika sebagai akibat pengaruh para pendidiknya. Sebuah kenyataan bahwa pola Amerika berkembang karena dibawa oleh akuntan lulusan perguruan tinggi karena pola itulah yang diterima sebagai landasan praktek nantinya. Dan dapat dipastikan bahwa pola Belanda cepat atau lambat akan terdesak, karena jumlah akuntan hasil pendidikan pola Amerika semakin hari semakin banyak.

Prof. Hadibroto merupakan motor penggerak dalam hal ini, terus menerus memberikan penjelasan dan penerangan dengan melalui tulisan ataupun seminar bagaimana dualisme ini harus segera diakhiri dan segera menentukan pilihan pola mana yang akan dipilih, sehingga terbentuk suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak yang terlibat di bidang ini. Puncaknya ialah keluarnya disertasi beliau tahun 1962 yang berjudul "A Comparative Study of American and Dutch Accountancy and Their Impact On The Profession In Indonesia" yang dalam bahasa Indonesianya

“Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan pengaruhnya Terhadap profesi di Indonesia”. Di sini Prof Hadibroto mengangkat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia pada awal periode 1960, menjadikannya sebuah karya ilmiah yang pertama mengenai akuntansi Indonesia dalam rangka memperoleh gelar doktornya.

Munculnya disertasi ini mengakibatkan timbulnya perang polemik di kalangan akuntan Indonesia. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1962, di mana hampir seluruh akuntan yang ada di Indonesia pada waktu itu meraih gelar dengan pola Belanda, Prof. Hadiboro mengeluarkan suara sumbang yang dapat merusak babakan atau simphony secara keseluruhan dan merupakan suatu keberanian tersendiri. Timbul kritik, pro dan kontra, mereka yang berpendidikan belanda tidak rela dipojokkan begitu saja. Mereka menjawab bahwa apa yang ditulis oleh Prof. Hadibroto tidak benar sama sekali, teori Belanda sama sekali tidak begitu. Mereka bangga bahwa mereka berhasil lulus sekolah di negara (Belanda) yang njlimet, ruwet, dogmatis, berbau filsafah, dan bersekolah 7 tahun, bukan produk studi terpimpin ala Amerika.

Dengan beredarnya tulisan tersebut, maka mereka yang berada di praktek atau di sekolah mulai sadar dan tergugah untuk turut mengamatinya, sehingga mata terbuka akan adanya perbedaan antara kedua pola tersebut. Karena dalam disertasi tersebut diuraikan secara lengkap mengenai Teori Akuntansi Amerika dan Teori Akuntansi Belanda serta beberapa penilaian atas kedua teori yang dikemukakan. Selain itu, juga diterangkan mengenai pelaksanaan praktek akuntansi Amerika dan praktek akuntansi Belanda, serta asas kedua praktek yang diterapkan diberikan

beberapa penilaian untuk memberikan gambaran secara jelas dari masing-masing praktek yang ada.

Salah satu yang diungkapkan dalam disertasi beliau, baik itu disadari atau tidak kiranya telah mendorong untuk membentuk suatu Prinsip Akuntansi Indonesia.

Pada bagian akhir disertasinya beliau mengemukakan sebagai berikut :

**“.... Indonesia, yang masih pada tingkat pertama perkembangan ekonominya, memerlukan lebih banyak teori-teori yang dapat dipakai dan tidak boleh mengabaikan terlalu banyak waktu membuat teori-teori ilmiah yang tidak langsung membantu perkembangan menyeluruh dari negeri itu. “Modal intelektual” sangat langka dan pemakaian optimal (yang paling baik) modal semacam ini untuk pembangunan ekonomi, hanya dapat dicapai dengan mengarahkan pemakaiannya pada persoalan-persoalan praktis’.<sup>5</sup>**

Pada bagian lain dikemukakan hal berikut :

**“prinsip-prinsip yang luas seperti “praktek dagang yang baik” pada teori akuntansi Belanda tidak dapat dipakai (non operasional) dan tidak memberikan peraturan-peraturan yang defenitif apa yang dianggap praktek yang baik. Pengertian prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima” dengan standar-standar bimbingannya yang jelas dan terinci yang dimajukan oleh ahli-ahli teori Amerika lebih berguna bagi profesi akuntan”.<sup>6</sup>**

Isyarat di atas memberikan makna bahwa keadaan profesi akuntansi Indonesia memerlukan teori-teori yang dapat memberikan kepada para anggotanya alat-alat yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kerjanya, seperti, standar-standar bimbingan untuk pemeriksaan, peraturan-peraturan bimbingan untuk penentuan pendapatan yang baik dan sebagainya. Selain itu untuk memperbaiki kecepatan

---

<sup>5</sup> S. Hadibroto, **Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Profesi di Indonesia**, Penerbit PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1982 hal. 3.

<sup>6</sup> **Ibid**, hal 142.

pelaksanaan tugas mereka, menghadapi ratio yang tidak seimbang antara jumlah akuntan yang cakap (qualified) dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

- Selain disertasi tersebut, faktor-faktor lain yang mendorong disusunnya suatu Prinsip (Standar) Akuntansi Indonesia yaitu, dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968<sup>7</sup>. Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut mulai timbul kebutuhan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal dan dapat dimengerti serta dapat diperbandingkan. Kebutuhan tersebut terutama sehubungan dengan permohonan kredit investasi dari bank pemerintah dan usaha patungan dengan investor asing, karena sebelum dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut penggunaan laporan keuangan oleh pihak di luar manajemen jarang sekali terjadi, kecuali untuk pelaporan fiskal, dan audit tahunan lazimnya hanya dilakukan atas laporan keuangan BUMN/BUMD dan perusahaan asing yang sangat sedikit jumlahnya.

Pada waktu itu bukan saja prinsip (standar) akuntansi, tapi juga standar audit belum terkodifikasi, sehingga baik laporan keuangan maupun laporan audit menjadi tidak mengenal standar pelaporan dan seringkali sulit diperbandingkan. Meskipun auditor menyebutkan “laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku”, sering kali timbul keraguan apa yang disebut sebagai “prinsip akuntansi yang lazim berlaku”. Di samping belum adanya standar tertulis, keraguan dan kerancuan juga disebabkan karena jumlah akuntan masih

---

<sup>7</sup> Hans Kartikahadi, **Dari PAI Sampai Ke SAK**, Disampaikan pada Acara Kongres IAI ke-VII, Prosiding Pendidikan Profesi Berkelanjutan, Bandung, 19-21 September 1994.

sangat sedikit, dan para praktisi yaitu tenaga akuntansi di perusahaan dan asisten auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) pada umumnya adalah lulusan SMA dan terutama yang berijazah Bond A dan sebagian kecil Bond B. Oleh karenanya IAI segera mengambil inisiatif untuk mengeluarkan prinsip-prinsip (standar) bimbingan yang kemudian akan mendapat persetujuan Departemen Keuangan.

### **Kesimpulan**

Perkembangan akuntansi Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebelum Indonesia mempunyai prinsip (standar) akuntansi yang baku, yaitu pada tahun 1973, sistem akuntansi Indonesia pada umumnya mengikuti dua pola, yaitu sistem akuntansinya Belanda dan Amerika.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya prinsip (standar) akuntansi Indonesia, yaitu, pertama, terdapatnya dualisme sistem akuntansi Indonesia, yang mengikuti pola Belanda di satu pihak dan yang mengikuti pola Amerika di pihak lain. Keluarnya disertasi Hadibroto mengenai hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah seharusnya mempunyai prinsip (standar) akuntansi yang baku sehingga Indonesia dapat mengakhiri polemik dualisme tersebut. Adapun faktor kedua yang mempengaruhi timbulnya prinsip (standar) akuntansi Indonesia adalah keluarnya UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan berlakunya kedua peraturan itu mulai timbul kebutuhan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dimengerti serta dapat diperbandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe M. Lian, 'Perkembangan Prinsip (Standar) Akuntansi Di Indonesia', **Jurnal Ekonomi**, Nomor 7, Penerbit FE-USU, Agustus 1998.
- Hadibroto S., **Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Di Indonesia**, Penerbit PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1982.
- Kartikahadi Hans, **Dari PAI Sampai Ke SAK**, Disampaikan pada Acara Kongres IAI ke-VII, Prosiding Pendidikan Profesi Berkelanjutan, Bandung, 19-21 September 1994.
- Sapiie Ansje Saribanon, Skripsi, **Sejarah Perkembangan Akuntansi Indonesia**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.
- Stibbe D.G. & Stroomberg St. J., **Encyclopaedie Van Nederlandsch Indie**.